

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman

### *Implementation of Micro Business Development Policy in Sleman Regency*

Anggita Sekar Rini<sup>1</sup>, Titis Dewi Anggalini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 07-11-2024

Diperbaiki 07-11-2024

Disetujui 08-11-2024

##### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Kerajinan Bambu,  
Pengembangan Usaha,  
Usaha Kerajinan Bambu

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendapatkan ide-ide terbaik untuk pembuatan alternatif kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, yang berfokus pada usaha kerajinan bambu. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran mendalam berdasar perspektif pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kerajinan bambu di Kabupaten Sleman berjalan kontinyu, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan berbagai program, berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan secara berkala. Akan tetapi, pengembangan usaha tersebut belum berjalan optimal karena masih menemui berbagai kendala, yaitu tingginya persaingan usaha produk bambu, kurang maksimalnya peran pemerintah daerah dalam pemasaran produk, peralatan produksi yang masih tradisional, keterbatasan modal, dan sulitnya regenerasi. Perlunya dilakukan pengkajian agar pengembangan usaha masyarakat berjalan optimal.

#### ABSTRACT

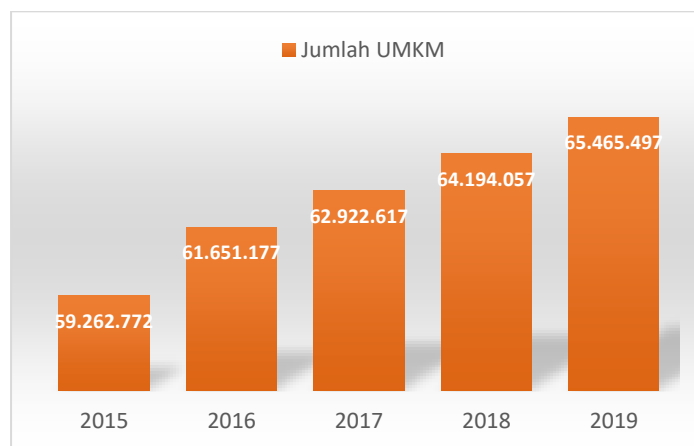
##### Keywords:

Policy Implementation,  
Bamboo Crafts, Business  
Development, Bamboo  
Craft Business

This study aims to obtain the best ideas for creating alternative micro-business development policies in Sleman Regency, which focus on bamboo craft businesses. This study uses a qualitative descriptive method, to provide an in-depth picture based on the perspectives of business actors and related stakeholders. The implementation of the bamboo craft business development policy in Sleman Regency runs continuously, the Sleman Regency Government carries out various programs, in the form of socialization, training, technical guidance, and periodic assistance. However, the development of this business has not run optimally because it still encounters various obstacles, namely high competition in bamboo product businesses, the less than optimal role of local governments in product marketing, production equipment is still traditional, limited capital, and the difficulty of regeneration. A study is needed so that the development of community businesses runs optimally.

## 1. Pendahuluan

Pengembangan usaha masyarakat merupakan wujud dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam pembuatan kebijakan pengembangan serta pembangunan yang akan dilaksanakan. Terdapat berbagai macam bentuk pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satu wujudnya dengan melakukan kerjasama menggandeng pemerintah daerah. Adanya kebijakan desentralisasi, maka dapat dijadikan sebagai mekanisme pengembangan usaha guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi pedoman bagi daerah untuk mengatur dan menjalankan daerahnya sendiri, yang mencakup pembangunan di bidang ekonomi. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi pemerintah di daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan, pengembangan, keterlibatan masyarakat, juga meningkatkan daya saing daerah, dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut terbukti pada saat krisis keuangan global melanda Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1997-1999 dan tahun 2008-2009. UMKM pada saat itu mampu menjadi penyelamat sektor perekonomian yang pada saat itu dilanda resesi[1].



Gambar 1 Data Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan, dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, UMKM di Indonesia secara stabil terus berkembang (Jumlah di atas merupakan estimasi dan bukan jumlah total keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia, hal tersebut karena masih terdapat banyak UMKM yang belum mendaftarkan usahanya sehingga sulit dilakukan pendataan). Indonesia berpotensi memiliki basis perekonomian yang kokoh karena jumlah UMKM (khususnya usaha mikro yang begitu banyak), didukung dengan daya serap tenaga kerja yang begitu besar. Pemerintah bersama para pemilik usaha terus berupaya untuk meningkatkan 'kelas' usaha mikro menjadi menengah dengan melakukan pengembangan usaha.

Basis usaha ini juga terbukti mampu bertahan saat dilanda krisis ekonomi[2]. Selain itu, pada usaha mikro perputaran transaksinya begitu cepat (karena umumnya menghasilkan produk lokal yang biasanya menjadi kebutuhan utama/primer masyarakat Indonesia).

DI Yogyakarta menempati urutan ke 13 dengan total UMKM yaitu 235.899. Jumlah UMKM tersebut cukup banyak, yaitu lebih dari 17% warga Yogyakarta merupakan pelaku UMKM. Banyaknya UMKM yang ada tentu turut memberikan kontribusi terhadap perputaran roda perekonomian di Yogyakarta. Hal tersebut berarti bahwa lebih dari 17% sektor usaha informal atau UMKM di Yogyakarta turut berkontribusi dalam PDB (Produk Domestik Bruto) pendapatan negara[3]. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pengakuan eksistensi yang konsisten terhadap suatu daerah yang bersifat istimewa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melimpahkan wewenangnya kepada daerah administrasi di bawahnya untuk mengatur dan menjalankan daerahnya masing-masing. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mencakup hubungan dalam wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya. Demi pencapaian tujuan negara, pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai bidang tersebut harus dilaksanakan secara adil dan selaras [4].

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam usaha kerajinan bambu di Kabupaten Sleman, antara lain yaitu: Kerajinan bambu mengalami penurunan permintaan pasar, akibat tingginya pola hidup ramah lingkungan, dimana masyarakat dunia mulai sadar untuk menggunakan produk *eco-green*, dimana negara-negara di Asia saling berlomba menciptakan kreasi baru produk yang terbuat dari bahan terbarukan "*renewable material*". Hal tersebut menimbulkan terbukanya peluang produk berbahan dasar bambu untuk bersaing di kancan internasional. Tingginya persaingan produk berbahan dasar bambu, sehingga diperlukannya pendampingan pemerintah daerah terhadap para pengrajin bambu agar mampu menghasilkan berbagai produk kerajinan bambu yang inovatif [5].

Kendala lain seperti terbatasnya informasi terkait akses penyebaran hasil produk kerajinan bambu dalam *expo* atau ajang pameran, baik di tingkat lokal, domestik, maupun internasional, karena pembinaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah belum maksimal, sehingga menyebabkan promosi produk para pengrajin hanya sebatas di lingkup daerah setempat serta masih menerapkan sistem pemasaran konvensional [6]. Ditambah dengan minimnya pengrajin yang produktif, hal tersebut karena terjadinya penurunan minat para generasi muda untuk menjadi pengrajin bambu, dimana kebanyakan usia produktif lebih memilih untuk menjadi pegawai kantoran dibandingkan harus mengelola industri bambu.

Keterbatasan modal turut berdampak dalam pemasaran produk secara luas, para pengrajin harus bertumpu kepada para pengepul, sehingga penghasilan yang didapatkan tidak sebanyak apabila para pengrajin menjual produknya sendiri. Berbagai permasalahan di atas memerlukan peran serta dari pemerintah, karena pemerintah memegang peranan penting dalam upaya melestarikan, mensejahterakan, serta mengembangkan usaha milik rakyat. Dengan berbagai strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan agar UMKM kerajinan bambu semakin berdaya saing dan perekonomian masyarakat

semakin meningkat. Perlunya mengetahui bagaimana jalannya kebijakan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Kabupaten beserta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dalam pengembangan UMKM kerajinan bambu di Sleman, mengetahui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengembangan UMKM kerajinan bambu di Sleman, mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh para pelaku usaha maupun apa yang terjadi ada pada saat berjalannya pengembangan UMKM kerajinan bambu, sehingga berbagai permasalahan yang terdapat pada UMKM Kerajinan Bambu di Sleman dapat diatasi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih agar peneliti mampu memperoleh wawasan dan informasi mendalam terkait topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis penerapan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama, keterlibatan peneliti sebagai instrumen utama, dalam proses pengambilan data peneliti secara langsung mengamati dan mengobservasi keadaan dan situasi di lapangan, yang mempermudah dalam perolehan data penelitian. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, yang didapatkan pada saat dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan teori milik Miles dan Huberman[7], yang di dalamnya mencakup: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusion drawing*).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Menurut Teori van Metter dan van Horn (1975)**

Peninjauan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan usaha kerajinan bambu di Kabupaten Sleman, dapat diukur menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada teori implementasi kebijakan milik Donald van Metter dan Carl van Horn (1975) [8], yang di dalamnya terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: ukuran serta tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana kebijakan, sikap atau kecenderungan (Disposisi) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat ditinjau berdasarkan ukuran serta tujuan dari kebijakan itu sendiri. Menurut van Horn dan van Metter dalam [9] bahwa ukuran serta tujuan kebijakan di dalamnya memuat indikator pengukuran sejauh mana standar dan tujuan kebijakan dapat dicapai. Dalam hal ini, kebijakan pengembangan usaha di tingkat daerah diatur dalam Perda Kab. Sleman No. 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, peraturan tersebut membahas pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro secara umum atau *general* dan tidak spesifik terkait usaha kerajinan bambu. Dengan potensi bambu yang begitu besar di Sleman, dimana tumbuhan bambu dapat hidup dengan mudah sehingga ketersediaan bahan baku kerajinan yang melimpah, maka kerajinan bambu menjadi salah satu produk unggulan di Sleman. Sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Sleman untuk memiliki visi-misi khusus terkait pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman, mengingat bahwa produk kerajinan bambu merupakan salah satu komoditas unggulan di Sleman dan perlu menjadi perhatian pemerintah setempat untuk mengembangkannya [10].

Data dari lapangan menunjukkan bahwa dalam pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman pemerintah setempat belum secara spesifik memiliki visi dan misi terkait pengembangan usaha kerajinan bambu, melainkan masih berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan pengembangan usaha di Sleman secara umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat ukuran dan tujuan yang spesifik untuk arah pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman. Terkait pengembangan kerajinan bambu di Sleman, Pemerintah Daerah Sleman sedang merancang Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda), yang lebih mengerucut atau lebih berfokus pada industri bambu. Selain terdapat peraturan daerah terkait pengembangan usaha mikro, juga terdapat peraturan mengenai izin usaha yang telah ditetapkan secara nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan tersebut yang menjadi dasar bagi pemerintah di tingkat daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*)[11].

Berdasarkan temuan di lapangan, belum semua usaha masyarakat mengantongi izin, meskipun izin usaha bersifat wajib dengan tujuan perlindungan usaha, legalitas usaha, serta perlindungan bagi konsumen. Dalam konteks pemberlakuan perizinan usaha, terdapat indikasi bahwa Pemerintah Sleman belum sepenuhnya tegas dalam pemberlakuan dan peninjauan para pelaku usaha, dibuktikan dengan data di lapangan bahwa sebagian pelaku usaha belum mendaftarkan perizinan usahanya. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak faktor, seperti proses pendaftaran secara daring yang dinilai rumit dan memakan waktu, yang diperkuat oleh pernyataan [12] yang menyatakan bahwa kendala sistem perizinan online (*OSS*) salah satunya karena rumitnya kerangka regulasi di Indonesia, meskipun *OSS* telah menggabungkan berbagai jenis perizinan yang ada di berbagai lembaga, masih terdapat banyak perizinan yang tumpang-tindih, tidak konsisten, bahkan saling bertentangan. Alasan lain seperti kurangnya sosialisasi

atau penyuluhan yang mengakibatkan para pelaku usaha kurang memahami terkait perizinan usaha terkini.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya sebagai elemen penunjang implementasi kebijakan dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor atau agen pelaksana kebijakan, serta sumber daya finansial. Maka dari itu, sumber daya menjadi bagian vital dalam proses pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan berjalan sesuai harapan [13]. Pelatihan marketing yang diberikan dirasa kurang maksimal karena per-tema hanya diselenggarakan satu kali. Para pelaku usaha kerajinan bambu merasa pelatihan yang diberikan kurang maksimal karena pelatihan tidak hanya seputar bambu saja, namun pelatihan usaha secara umum, serta rata-rata hanya dilakukan satu kali, sehingga kurang efektif. Sementara di Taiwan mulai tahun 2005 Institut Penelitian dan Pengembangan Kerajinan Nasional Taiwan menggelorakan program kerjasama antara guru dan mahasiswa untuk mempromosikan dan mensosialisasikan pembelajaran kerajinan di masyarakat dalam pengembangan produk kerajinan lokal serta meningkatkan produksi kerajinan sebagai wujud pembinaan industri lokal. Program tersebut berhasil dan mampu menghasilkan banyak karya dari kolaborasi antara para pengrajin dan desainer bambu, sehingga mampu menembus pameran-pameran internasional, seperti yang diselenggarakan di New York, Paris, dan Milan [14].

Pemda Sleman berperan dalam pemberian berbagai fasilitasi para pelaku usaha, berupa pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) beserta penyediaan Rumah Kreatif Sleman (RKS). Keduanya menjadi wadah bagi UMKM Sleman untuk mengembangkan dan memasarkan produknya. Meskipun pemerintah Indonesia telah mampu mengikuti pameran internasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), untuk menampilkan beragam kerajinan tangan Indonesia (salah satunya bambu), akan tetapi masih terbatas dan belum konsisten dilaksanakan setiap tahun, serta terkadang produk kerajinan berbahan dasar bambu yang ditampilkan berasal dari berbagai daerah lain di Indonesia, tidak hanya dari Sleman. Selain itu, ditinjau dari segi penggunaan peralatan pengolahan bambu, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju lainnya. seperti di Cina dan Jepang yang sudah menggunakan teknologi *Computer Numerical Control* (CNC) dan laser pemotong/laser cutting yang membantu proses pemotongan bambu secara cepat dan presisi, juga pengembangan perangkat lunak CAD yang berfungsi untuk pemodelan 3D otomatis produk anyaman bambu [15]. Penggunaan teknologi modern di atas, memungkinkan dilakukannya produksi dalam skala besar dengan kualitas yang terjaga dan konsisten, berbeda dengan penggunaan alat produksi tradisional yang kurang efisien dan kualitas produk yang tidak stabil, turut mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional.

Penghambat lain dari segi finansial yaitu modal. Berbagai persyaratan peminjaman modal dirasa memberatkan bagi para pelaku usaha kerajinan bambu. Kebanyakan pemilik usaha kerajinan bambu menggunakan modal pribadi untuk menjalankan bisnisnya, bahkan masih terdapat yang mengandalkan *Down Payment* (DP) dari pelanggan/*customer*. Pemerintah Daerah sebenarnya memberikan

bantuan permodalan berupa Dana Penguatan Modal (DPM) yang sifatnya hanya stimulus. Pemberian bantuan tersebut dengan memilih sampel usaha yang paling berpotensi untuk maju dan dapat dijadikan contoh bagi usaha lain agar mencontoh jejaknya dan dapat mencari modal secara mandiri. Apabila dibandingkan dengan pemerintah di negara Cina, pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya di Sleman masih tertinggal jauh. Dimana Pemerintah Cina memberikan bantuan subsidi setiap hari bagi para pengrajin wanita yang mengikuti lokakarya pembuatan produk anyaman bambu, sebesar 60 yuan atau setara 9 dolar AS, selain itu para pelatih dari para pengusaha anyaman bambu memperoleh 200 yuan setiap hari sebagai upah pelatihan. Pembuatan produk anyaman bambu dapat dilakukan di rumah, lalu akan diperiksa dan dibeli perusahaan anyaman bambu jika memenuhi kriteria [16].

#### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Sikap penolakan atau penerimaan para pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja kebijakan publik, hal tersebut karena kebijakan yang diimplementasikan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengetahui secara pasti permasalahan yang dihadapi, namun kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan kebijakan 'dari atas' atau *top down*, yang memungkinkan para pembuat kebijakan tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi keinginan masyarakat [17]. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman beserta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas serta fungsinya mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang membentuknya. Masing-masing staf pada Dinas terkait menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dinas-dinas di Kabupaten Sleman berpedoman kepada visi misi kepala daerah (Bupati Sleman). Pemahaman terhadap visi dan misi daerah menjadi penting, karena umumnya staf yang kompatibel dapat memahami dengan baik terhadap visi misi kepala daerah beserta kebijakan-kebijakan strategis yang harus mereka implementasikan. Dalam hal ini, staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman kurang bisa transparan terkait anggaran dana dalam program pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman. Pihaknya juga kurang bisa menentukan kecukupan anggaran pelaksanaan program pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman. Ketidaktransparan anggaran menjadi salah satu indikasi bahwa agen pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya memahami atau merefleksikan visi-misi kepala daerah tersebut.

#### d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Kaitannya dengan sikap para agen pelaksana kebijakan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Dinas Koperasi Sleman) dalam implementasi kebijakan strategis memerlukan komitmen serta kejujuran, dalam hal ini dapat diketahui bahwa masing-masing dinas tersebut menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan yang bertugas menerjemahkan rencana strategis pemerintah daerah ke dalam program-program yang spesifik dan dapat diukur. Dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman,

Disperindag dan DiskopUKM Sleman menyusun strategi mengkoordinasikan berbagai sumber daya (sumber daya anggaran, manusia, maupun faktor internal dan eksternal). Pemerintah berupaya mengalokasikan sumber daya semaksimal mungkin dan memberikan motivasi bagi para pelaku usaha kerajinan bambu, agar tercipta *local champion* yang dapat memotivasi pelaku usaha lain untuk mengikuti langkahnya mencapai kemandirian dan kesuksesan. Selanjutnya terkait perizinan usaha, kedua dinas tersebut melakukan penataran terkait izin usaha, menawarkan dan membantu pembuatan izin usaha, seperti penerbitan NIB *SS approach*, yang diregister secara daring dengan sistem pendekatan berbasis risiko, meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan kebijakan perizinan usaha secara *online* belum terlaksana secara optimal.

Dinas-dinas dalam pembuatan kebijakan menyesuaikan kebijakan agar relevan dengan kebutuhan, potensi, serta tantangan di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu dengan membuka dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman berlandaskan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya dilaksanakan di kelurahan, dengan menampung usulan dan aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah di atasnya. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Sleman dalam memecahkan permasalahan di lapangan tidak dapat langsung efektif dalam memberikan solusi. Sebagian pelaku usaha kerajinan bambu merasa bahwa dalam menangani permasalahan dan hambatan di lapangan, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dapat serta-merta langsung beraksi seperti 'obat', dimana memerlukan proses yang tidak instan. Meskipun sudah dilakukan pengembangan usaha secara terus menerus dan kontinyu, terkadang yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasa kurang tepat, sebagian menganggap bahwa ketidaktepatan tersebut akibat arah pengembangan masih belum jelas, kebutuhan dengan yang diberikan kepada masyarakat kadangkala kurang tepat, sehingga diperlukannya *sustainability* atau keberlanjutan tema, dengan memperhatikan tingkatan atau kategori (ada yang masih di tahap pengembangan, tumbuh-berkembang, hingga maju), hal-hal tersebut yang harus disinergikan, guna percepatan industri bambu.

#### e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat pelaku usaha kerajinan bambu di Sleman berjalan baik, dimana kebanyakan ketua sentra industri bambu merupakan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dalam upaya menjaga hubungan baik dengan para pelaku usaha kerajinan bambu di Sleman, pemerintah daerah berupaya untuk sering melakukan kunjungan dan saling bertukar kabar dan informasi dengan masyarakat. Pemberian berbagai informasi dilakukan melalui platform *online* yaitu *whatsapp group*. Kerjasama dan koordinasi masing-masing dinas di Kabupaten Sleman yaitu dalam bentuk koordinasi. Umumnya dinas yang berkaitan atau menangani urusan serupa akan saling berkoordinasi.



Kerjasama hulu–hilir dalam proses implementasi kebijakan penting untuk memastikan keefektifan dan keberhasilan kebijakan yang dijalankan. Diperlukannya sinergi dalam aspek yang kompleks, mulai dari proses pembibitan, pengolahan, hingga penjualan produk berbahan dasar bambu. Pentingnya integrasi dari aspek hulu (yaitu terkait sumber daya awal atau produksi) dengan aspek hilir (terkait pengolahan, distribusi, pemasaran, dan penggunaan akhir produk yang dihasilkan), dengan tujuan keseluruhan proses dapat dipastikan berjalan lancar dan efisien [18]. Hal tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam praktiknya, kerjasama hulu–hilir terkait pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman tidak dapat dikatakan sudah maksimal, hal tersebut karena untuk menghubungkan kerjasama hulu–hilir dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Dinas Koperasi Sleman, Dinas Lingkungan Hidup merupakan inisiatif pelaku usaha sendiri, karena belum banyak sinergi atau pembahasan dalam satu ruang terkait pengembangan usaha kerajinan bambu. Anggapan beberapa pelaku usaha kerajinan bambu yang mengatakan belum terdapat kejelasan peran pemerintah dalam menangani kebutuhan *raw material* hingga menjadi bahan produksi siap ekspor. Belum adanya kejelasan dorongan memperkuat para pengrajin, baik dari sisi mebel, kerajinan, atau dari keseluruhan bambu, sehingga benar-benar berhasil dalam melakukan pengembangan.

#### f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dampak kondisi sosial, ekonomi, serta politik dalam kebijakan publik menjadi salah satu fokus utama selama dasawarsa lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik sangat tertarik dan mendalami pengaruh variabel-variabel lingkungan pada output/keluaran/hasil kebijakan, meskipun seringkali dampak berbagai faktor tersebut dalam implementasi kebijakan hanya memperoleh sedikit perhatian, tetapi van Metter dan van Horn berpandangan bahwa berbagai faktor tersebut berpotensi memberikan efek atau dampak yang besar terhadap pencapaian badan-badan pelaksana [8]. Penjualan kerajinan bambu di tingkat global dipengaruhi oleh permintaan pasar dan persaingan harga, dimana harga jual produk luar negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri, salah satu faktornya karena penggunaan teknologi canggih yang mampu memproduksi lebih banyak unit dalam tempo waktu yang lebih singkat, hal tersebut tentu menyebabkan kebanyakan pembeli lebih memilih produk dengan harga yang kompetitif. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia kalah dari sisi harga dibandingkan Vietnam, kalah dari sisi penggunaan mesin dibandingkan Cina. Perlunya terobosan dan inovasi agar dapat bersaing dan diterima pasar [19].

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, dimana ekonomi menjadi lesu. Sebagai langkah pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19, pemerintah membuat kebijakan meskipun tidak secara spesifik membahas usaha kerajinan bambu, tetapi peraturan yang dibuat lebih bersifat umum. Fokus pemulihan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Sleman terkait sektor pariwisata, karena yang paling banyak

berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, akan lebih baik apabila UMKM kerajinan bambu turut menjadi fokus perhatian pemerintah, meskipun kontribusi terhadap PDB belum sebanyak sektor pariwisata dan akomodasi, hal tersebut mengingat bahwa sektor kerajinan bambu berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja khususnya di pedesaan.

Kondisi sosial berpengaruh terhadap jalannya usaha para pelaku kerajinan bambu di Kabupaten Sleman, karena kondisi umum di pedesaan masih banyak yang belum tersentuh teknologi digital, tentunya berbeda dengan wilayah yang lebih maju atau sudah terbiasa dengan kemajuan internet, salah satu contohnya perbedaan pola atau cara pemasaran produk, rata-rata pemilik usaha kerajinan bambu di Sleman belum memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memasarkan produknya, pemasaran masih secara konvensional atau tradisional dan minim menggunakan *digital marketing* [20]. Ditinjau dari segi keberlanjutan usaha, regenerasi menjadi tantangan dalam pengembangan industri kerajinan bambu, dimana anak muda cenderung menjadikan sektor kerajinan bambu sebagai opsi (bukan pilihan utama), karena dianggap sebagai pekerjaan kasar. Regenerasi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Sleman. Meskipun sudah terdapat berbagai program dan pelatihan, bimtek yang menarik, namun tampaknya belum mampu memberikan solusi yang benar-benar efektif guna menarik minat para generasi muda untuk menekuni bidang ini.

### 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman

Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, di antaranya:

- a. Adanya fasilitasi para pelaku usaha, berupa pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) beserta penyediaan Rumah Kreatif Sleman (RKS), yang menjadi wadah pengembangan UMKM. Dekranasda berfokus pada pengembangan kerajinan dan potensi unggulan daerah, promosi produk dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah maupun swasta, serta pelestarian kesenian dan budaya lokal, sementara Rumah Kreatif Sleman cenderung ke arah pelatihan dan pengembangan UMKM, sebagai fasilitator konsultasi dan pendampingan bisnis, penyediaan ruang untuk inovasi produk dan desain, serta penghubung akses pasar
- b. Sektor pariwisata D.I. Yogyakarta yang unggul mampu menarik wisatawan lokal maupun internasional. Banyaknya wisatawan yang datang, membuka potensi bagi penduduk lokal untuk meningkatkan penjualan produknya. Kerajinan bambu yang merupakan salah satu produk alami dan ramah lingkungan berpotensi mengget wisatawan yang peduli kelestarian lingkungan. Adanya desa wisata dapat dijadikan sebagai ajang promosi produk karya masyarakat lokal, salah satunya yaitu produk kerajinan atau *craft* berbahan dasar bambu, mengingat bahwa kebanyakan sentra bambu berlokasi di pedesaan yang sering dijadikan sebagai destinasi wisata oleh wisatawan luar.

- c. Pemanfaatan teknologi digital, berpotensi untuk penetrasi produk secara lebih luas, yang dapat dimanfaatkan generasi muda sebagai peluang berwirausaha secara digital. Dapat diketahui bahwa banyak pengrajin bambu generasi tua memasrahkan bisnisnya kepada anaknya agar dipromosikan dan dijual melalui platform digital. Sebagian besar pemilik usaha kerajinan bambu di Sleman meyakini bahwa generasi muda saat ini memiliki potensi yang besar untuk sukses menjalankan bisnis *online*.

Dalam implementasi kebijakan juga terdapat penghambat tercapainya tujuan suatu kebijakan. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Pemecahan masalah di lapangan, yang tidak langsung berjalan efektif. Sebagian pelaku usaha kerajinan bambu merasa bahwa dalam menangani permasalahan dan hambatan di lapangan, kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dapat serta-merta langsung beraksi seperti 'obat', dimana memerlukan proses yang tidak instan, terkadang tindakan pemerintah dirasa kurang tepat. Ketidaktepatan tersebut akibat arah pengembangan masih belum jelas, kebutuhan dengan yang diberikan kepada masyarakat kadangkala kurang tepat,
- b. Kemauan mengikuti pelatihan masih minim, kendala di sektor bambu, usia para pengrajin bambu yang rata-rata tidak lagi muda (memasuki usia senja) yang kebanyakan akan susah untuk diberikan pelatihan seperti sosial media, marketing. Sebagian para pengrajin bambu yang diusulkan ketua sentra untuk mengikuti pelatihan di Dinas Sleman merasa tidak mampu dan menyerah lebih awal.
- c. Regenerasi atau keberlanjutan, menjadi salah satu penghambat usaha kerajinan bambu di Sleman. Rata-rata generasi muda kurang berminat untuk mempelajari pengetahuan serta keterampilan tradisional mengolah bambu menjadi kerajinan, hal tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang pengolahan bambu secara tradisional. Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan pandangan atau *mindset* generasi muda berubah.
- d. Manajemen usaha kerajinan bambu yang masih tradisional, hal tersebut ditinjau berdasarkan metode produksi, manajemen keuangan, cara promosi produk yang masih tradisional, serta ketergantungan terhadap pasar lokal, dan sulitnya akses permodalan.
- e. Kerjasama hulu–hilir yang belum dapat dikatakan maksimal, hal tersebut karena anggapan beberapa pelaku usaha kerajinan bambu yang mengatakan belum terdapat kejelasan peran pemerintah dalam menangani kebutuhan *raw material* hingga menjadi bahan produksi siap ekspor. Belum adanya kejelasan dorongan memperkuat para pengrajin, baik dari sisi mebel, kerajinan, atau dari keseluruhan bambu, sehingga benar-benar berhasil dalam melakukan pengembangan.
- f. Kurangnya transparansi anggaran, Pemerintah Daerah Sleman kurang bisa terbuka mengenai jumlah anggaran serta realisasinya untuk pelaksanaan program pengembangan usaha kerajinan bambu di Sleman. Kemudian

terkait kecukupan anggaran, pihak juga tidak dapat dipastikan berapa jumlah standar anggaran yang diperlukan untuk pengembangan industri bambu di Sleman.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan terkait implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, berjalan secara kontinyu dengan melibatkan banyak pihak (*stakeholders*) di dalamnya. Peran Pemerintah Daerah Sleman, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam hal ini, yaitu menjalankan berbagai program/kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, bimbingan-teknis, pameran/*expo*, juga fasilitasi pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Rumah Kreatif Sleman (RKS) sebagai sarana penunjang usaha masyarakat. Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro (Kerajinan Bambu) di Kabupaten Sleman telah ditinjau menggunakan indikator: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pelaksanaannya menemui berbagai tantangan dan kendala yang perlu ditindaklanjuti dan dicari solusi pemecahan masalahnya. Permasalahan tersebut di antaranya: belum terdapat visi-misi khusus terkait pengembangan usaha kerajinan bambu, kurang maksimalnya pemerintah dalam pemberian informasi dan akses pemasaran produk, rata-rata pelaku usaha kerajinan bambu di Sleman terkendala permodalan, serta belum terdapat langkah atau cara efektif dari Pemerintah Daerah Sleman dalam mengatasi kurangnya regenerasi atau keberlanjutan usaha kerajinan bambu di Sleman.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman yaitu adanya sarana-prasarana pendukung, sektor pariwisata D.I. Yogyakarta yang unggul, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai peluang penjualan kerajinan bambu online. Sementara faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, yaitu pemecahan masalah di lapangan yang tidak langsung berdampak, kurangnya kemauan masyarakat mengikuti pelatihan, sulitnya regenerasi usaha, manajemen usaha masih tradisional, kerjasama hulu-hilir masih minim, dan kurangnya transparansi anggaran untuk pengembangan usaha.

#### Referensi

- [1] K. Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global," *J. Inov. Bisnis dan Manaj. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 117–127, 2018.
- [2] E. Listyaningsih and A. Alansori, *Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2020.
- [3] Merdeka.com, "Tak Harus di Jalan Raya, di Pelosok Pun UMKM Jogja Bisa Laris Manis," *merdeka.com*, 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/tak-harus-di-jalan-raya-di-pelosok-pun-umkm-jogja-bisa-laris-manis.html?page=2> (accessed Jun. 13, 2024).
- [4] I. Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi,

2018. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=oJBiDwAAQBAJ>
- [5] I. Setiawan, "Potensi Pengembangan Desain Produk Bambu Kabupaten Sleman," *J. Desain Prod. (Pengetahuan dan Peranc. Produk)*, vol. 4, no. 2, pp. 151–156, 2021.
- [6] H. Widyaningsih, "Analisis Swot dan Promosi Kerajinan Bambu Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman Yogyakarta," *J. Pariwisata dan Budaya*, vol. 3, no. 2, pp. 1–25, 2012.
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- [8] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- [9] R. C. Hartawan, F. Kosasih, and Rochmani, "Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model," *Int. J. Humanit. Educ. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 4, pp. 1348–1358, 2023.
- [10] N. T. Wulandari, D. H. Darwanto, and Irham, "Analisis Nilai Tambah dan Kontribusi Industri Kerajinan Bambu pada Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Sleman," *J. Agro Ekon.*, vol. 26, no. 02, pp. 192–205, 2015.
- [11] F. P. Rahayu, E. Paselle, and T. R. Khaerani, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda," *J. Adm. Publik*, vol. 09, no. 02, pp. 5018–5032, 2021.
- [12] K. A. Polly, M. Y. Tampanguma, and P. Prayogo, "Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *J. Lex Adm.*, vol. 12, no. 04, pp. 1–9, 2024.
- [13] Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- [14] Y. Dai and S.-H. Hwang, "Technique, Creativity, and Sustainability of Bamboo Craft Courses: Teaching Educational Practices for Sustainable Development," *J. Sustain.*, vol. 11, no. 09, pp. 1–20, 2019, doi: 2487.
- [15] Y. Sun and X. Liu, "How Design Technology Improves the Sustainability of Intangible Cultural Heritage Products: A Practical Study on Bamboo Basketry Craft," *J. Sustain.*, vol. 14, no. 19, pp. 1–20, 2022.
- [16] B. Luo, S. Ahmed, and C. Long, "Bamboos for Weaving and Relevant Traditional Knowledge in Sansui, Southwest China," *J. Ethnobiol. Ethnomed.*, vol. 16, no. 63, pp. 1–9, 2020.
- [17] L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revi. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [18] D. Sutrisno, A. Suryono, and A. Said, "Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro Dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 19, no. 2, pp. 101–112, 2016.
- [19] D. W. P. Ranto, "Pengaruh Knowledge Sharing terhadap Kemampuan Inovasi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Yogyakarta dengan Absorptive Capacity sebagai Variabel Intervening," *J. Siasat Bisnis*, vol. 19, no. 02, pp. 132–145, 2015.
- [20] R. Kusumawardhani, I. S. Kurniawan, and N. K. Ningrum, "Pelatihan Pemasaran Digital dan Manajemen Usaha untuk Akselerasi Kinerja UKM Pengrajin Bambu di Desa Tritoadi, Mlati, Sleman," *J. Pengabd. Pada Masy.*, vol. 05, no. 01, pp. 11–17, 2020, doi: 10.30653/002.202051.306.